

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
KELURAHAN MUNGSENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Mungseng Tahun Anggaran 2022	5
Realisasi Belanja APBD Kelurahan Mungseng adalah sebesar Rp.833.649.244,00 (Delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua empat puluh empat rupiah) atau tercapai 85,18% dari target sebesar Rp.978.682.800,00 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	6
BAB III	7
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	7
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	7
3.1.1. Pendapatan - LRA	7
3.1.2. Pendapatan - LRA	7
3.1.3. Belanja	7
Realisasi APBD Tahun 2022 pada Kelurahan Mungseng sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2022 Kelurahan Mungseng. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.	7
3.1.4. Pendapatan - LO	8
3.1.5. Beban	8
3.1.6. Aset	9
3.1.7. Kewajiban	11
3.1.8. Ekuitas Dana	12
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	13
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	15
BAB V	18
PENUTUP	18

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Mungseng sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022,, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Mungseng Tahun Anggaran 2022

TAHUN ANGGARAN 2022
REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD
KELURAHAN MUNGSENG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BELANJA DAERAH	978.682.800,00	833.649.244,00	85,18
a	Belanja Pegawai	8.075.000,00	7.425.000	91,95
b	Belanja Barang dan Jasa	970.607.800,00	826.224.244,00	85,12
c	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0
d	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0
	JUMLAH BELANJA DAERAH	978.682.800,00	833.649.244,00	85,18

Realisasi Belanja APBD Kelurahan Mungseng adalah sebesar Rp.833.649.244,00 (Delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua empat puluh empat rupiah) atau tercapai 85,18% dari target sebesar Rp.978.682.800,00 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.075.000,00 (Delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 0,83% dari total anggaran

belanja, dengan Realisasi Rp.7.425.000,00 (Tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

2. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 970.607.800,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau dari 99,17% dari total anggaran belanja, dengan Realisasi Rp. 826.224.244,00 (Delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Mungseng Kecamatan Temanggung TA. 2022 yang tidak optimal antara lain:

1. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

3.1.2. **Pendapatan - LRA**

Di Anggaran Pendapatan Kelurahan Mungseng Rp.0- , dan untuk pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan Kelurahan Mungseng Rp. 0,-

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	0	0	0
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0
4102	Retribusi Daerah	0	0	0
410201	Retribusi Jasa Umum	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	0	0	0

3.1.3. Belanja

Realisasi APBD Tahun 2022 pada Kelurahan Mungseng sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2022 Kelurahan Mungseng. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

REALISASI ANGGARAN (OBJEK)
KELURAHAN MUNGSENG TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
5	BELANJA DAERAH	978.682.800,00	833.649.244,00	(145.033.556,00)

51	BELANJA OPERASI	978.682.800,00	833.649.244,00	(145.033.556,00)
5101	Belanja Pegawai	8.075.000,00	7.425.000,00	(650.000,00)
5102	Belanja Barang dan Jasa	970.607.800,00	826.224.244,00	(144.383.556,00)
	JUMLAH BELANJA	978.682.800,00	833.649.244,00	(145.033.556,00)

Jumlah Realisasi belanja daerah TA 2022 sebesar Rp 833.649.244,00 atau tercapai 85,18% dari target sebesar Rp 978.682.800,00

1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang/ jasa. Berikut realisasinya:

- Belanja pegawai terealisasi sebesar 7.425.000,00 atau 91,95% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.075.000,00.
- Belanja Barang/ Jasa terealisasi sebesar Rp. 826.224.244,00 atau 85,12% dari anggaran yang disediakan sebesar 970.607.800,00

Belanja operasi tidak terserap 100% karena ada sisa anggaran yang tidak dapat dibelanjakan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan.

3.1.4. Pendapatan - LO

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	0
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0
7102	Retribusi Daerah-LO	0
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	0
	Jumlah Pendapatan	0

3.1.5. Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	899.917.810,43
81	BEBAN OPERASI	899.917.810,43
8101	Beban Pegawai	7.425.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	826.878.509,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	65.614.301,43
	Jumlah Beban	899.917.810,43

3.1.6. Aset

a. Aset lancar

- Kas dan setara kas

Kas dan setara kas	2022	2021
	Rp.	Rp.
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah kas dan Setara Kas	0,00	0,00

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,-.

- Persediaan

Persediaan	2022	Persediaan	2021
Bahan Lainnya	30.000	Kertas dan Cover	279.600
Kertas dan Cover	174.000	Benda Pos	380.000
Bahan Komputer	168.000	Bahan Komputer	42.000
		Alat Listrik	79.200
		Alat/Bahan untuk Kegiatan	6.300

		Kantor Lainnya	
Jumlah persediaan	372.000		787.100

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp. 372.000,00 dan Rp. 787.100,00-

- Aset Tetap

NO	NAMA REKENING	2022	2021
13	ASET TETAP	9.743.763.030,00	9.810.221.081,43
1301	Tanah	8.930.413.000,00	8.930.413.000,00
1302	Peralatan dan Mesin	273.489.000,00	280.604.000,00
1303	Gedung dan Bangunan	818.654.000,00	818.654.000,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	307.730.000,00	307.730.000,00
1305	Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
1307	Akumulasi penyusutan	(586.589.470,00)	(527.246.418,57)

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah Rp.9.810.221.081,43,- Sedangkan nilai aset tetap per 31 Desember 2022 adalah Rp9.743.763.030,00. Nilai aset tetap peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp7.115.000,00 yaitu reklas ke barang ekstrakomtabel. Sedangkan nilai akumulasi penyusutan mengalami perubahan dari saldo awal tahun 2022, yaitu bertambah sebesar Rp65.614.301,43 yaitu merupakan beban penyusutan tahun 2022 dan berkurang sebesar Rp6.271.250 karena reklas ke barang ekstrakomtabel, sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2022 adalah Rp586.589.470.

- Aset Tetap Lainnya

NO	NAMA REKENING	2022	2021
15	ASET LAINNYA	0,00	0,00

1504	Aset Lain-lain	3.785.000,00	3.785.000,00
150401	Aset Lain-lain	3.785.000,00	3.785.000,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.785.000,00)	(3.785.000,00)
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.785.000,00)	(3.785.000,00)

Nilai aset lainnya dan akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2022 sama dengan per 31 Desember 2021, atau tidak ada mutasi menambah atau mengurangi.

3.1.7. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2022	Tahun 2021
Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp.5. 539.450,00	Rp. 5. 300.285 ,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp. 5.539.450,00	Rp. 5.300.285,00

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.300.285 dan Rp.5.539.450. Utang belanja tahun 2022 terdiri dari utang belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.539.450,00- yang terdiri dari:

Nama Utang	Jumlah
Utang jasa tenaga administrasi Bulan Desember 2022	Rp. 2.000.000,00
Utang jasa tenaga kebersihan Bulan Desember 2022	Rp. 1.500.000,00
Utang jasa tenaga keamanan Bulan Desember	Rp. 1.500.000,00
Utang Air bulan Oktober 2022	Rp. 235.500,00
Utang Air bulan November 2022	Rp. 21.000,00
Utang Air bulan Desember 2022	Rp. 30.200,00
Utang Telepon	Rp. 252.750

2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang	2022	2021
	Rp.	Rp.
Utang dalam negeri	0,-	0,-
Utang jangka panjang lainnya	0,-	0,-
Jumlah kewajiban jangka panjang	0,-	0,-

Baik di tahun 2022 maupun pada tahun 2021 tidak ada kewajiban jangka panjang.

3.1.8. Ekuitas Dana

Jumlah Ekuitas sampai dengan akhir TA 2022 adalah Rp. 9.738.595.580,00

NO	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	9.805.707.896,43
2	Surplus / (Defisit) LO	(899.917.810,43)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	241.407.170,00
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	591.398.324,00
5	Ekuitas Akhir	9.738.595.580,00

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2022.

LRA		LO		Selisih
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 79.200.000,00	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp 79.200.000,00	Rp -
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 18.000.000,00	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 18.000.000,00	Rp -

Belanja Jasa Tenaga Keaman an	Rp 18.000.000,00	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp 18.000.000,00	Rp -
Belanja Tagihan Telepon	Rp 3.033.005,00	Beban Tagihan Telepon	Rp 3.034.120,00	Rp 1.115,00
Belanja Tagihan Air	Rp 727.300,00	Beban Tagihan Air	Rp 965.350,00	Rp 238.050,0 0
Belanja Tagihan Listrik	Rp 2.539.000,00	Beban Tagihan Listrik	Rp 2.539.000,00	Rp -

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp2.000.000,00, Rp1.500.000,00, dan Rp1.500.000,00. Pada pos Tagihan Telepon ada selisih sebesar Rp1.115,00 selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp251.635,00 dan Rp252.750,00. Selisih tersebut juga terdapat pada pos Tagihan Air karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp48.650,00 dan Rp286.700,00. Sedangkan pada pos Tagihan Listrik tidak ada selisih karena Tagihan Listrik dibayarkan dengan cara prabayar/token.

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Kelurahan Mungseng merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi kecamatan di kabupaten temanggung. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Temanggung. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Kelurahan Mungseng.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi diselenggarakan oleh unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Berikut adalah Perangkat Daerah beserta alamatnya:

NO	Perangkat Daerah	Alamat
1.	Kelurahan Mungseng	Jl. Tlogmulyo Km. 1,5 Temanggung

B. BAGAN ORGANISASI SELAMA TAHUN BERJALAN

NO	Nama	Jabatan
1.	AGUS SULISTIYO, S.Sos. MM	LURAH
2.	ARIEF KURNIAWAN, A.Md	SEKRETARIS LURAH
3.	AHMAD MASHURI	SIE. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BENDAHARA
4.	REJEKI HANDAYANI, S..E	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
5.	SITI MAISAROH, A.Md	TENAGA ADMINISTRASI
6.	UMI FARICHAH	TENAGA KEBERSIHAN
7..	MUCH MUHSIN	TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

C. INFORMASI GEOGRAFIS

Informasi geografis Kelurahan Mungseng antara lain meliputi :

1. Letak Geografi

Kelurahan Mungseng terletak bentangan dari utara sampai selatan. pada ketinggian 610 m dpl serta berjarak 2 km dari ibu kota kecamatan dan 1,5 km dari ibu kota kabupaten dengan luas wilayah 105.955 ha. Mungseng mencakup daerah seluas 113 ha yang lahannya terbagi atas lahan sawah (69 ha) dan bukan sawah (44 ha). Lahan bukan sawah dipergunakan untuk bangunan/pekarangan, kolam/empang dan lainnya .

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Temanggung II

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Purworejo

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balerejo

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Giyanti

2. Keadaan alam

Wilayah Kelurahan Mungseng merupakan dataran dengan ketinggian antara 500 – 1450 m di atas permukaan laut dan secara geomorfologi, Kemiringan tanah yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak terjal. Adapun sungai yang ada di Kelurahan Mungseng antara lain: Sungai Mbalong, Sungai Ndagen, Sungai Sebandung,

3. Pembagian Wilayah Administratif

Kelurahan Mungseng terdiri dari 4 Rukun Warga dan 19 Rukun Tetangga dengan rincian sebagai berikut :

1. RW I : Lingkungan Kemantenan Sari, 4 RT
2. RW II : Lingkungan Banyukembar, 5 RT
3. RW III : Lingkungan Argodewi, 6 RT
4. RW IV : Lingkungan Daleman, 4 RT

4. Kependudukan

Berdasarkan paparan dari Data Aplikasi Kependuduk Kelurahan Mungseng Tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebesar 3.289 jiwa, terdiri dari 1.669 jiwa laki-laki dan 1.620 jiwa perempuan .

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2022 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung , 2 Januari 2023

KEPALA KELURAHAN MUNGSENG

Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang



AGUS SULISTIYO, S.Sos.MM

NIP.19690807 198903 1 007